



**TEORI, METODOLOGI, TEKNIK  
DAN EPISTEMOLOGI DALAM ILMU PENGETAHUAN**

Oleh:  
**Tati Sarihati**

**ABSTRAK**

Teori, metodologi, teknik dan epistemologi memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dalam membangun konstruksi ilmu pengetahuan. Teori digunakan untuk menyusun konsep konsep dan fakta fakta kedalam suatu pola yang koheren/logis dan untuk memprediksi hasil penelitian yang akan datang.

Untuk menegakkan teori, setiap cabang cabang ilmu mengembangkan metodologinya sesuai dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Khasanah teoritis sebuah ilmu selalu dinilai berlandaskan pada pengujian empiris.

**Kata Kunci: Teori, Metodologi, Teknik dan Epistemologi**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hirsch, Travis & Hanan C, Selvin. 1973. *Principles of Survey Analysis*. The Mac Millan Company.
- Koentjaraningrat. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- 1981. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernalogy, Sebuah Rekonstruksi Ilmu pengetahuan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Popper, Karl.R.1983. *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. London: The Clarendon Press.
- Silalahi, Ulbert. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya
- Suryasumantri, Yuyun. 2005. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*.



Taryadi, Alfons. 1989. *Epistemologi Pemecahan Masalah menurut Karl Popper*. Jakarta: PT Gramedia

Peursen, Van. 1989. *Susunan Ilmu Pengetahuan*, Terjemahan BPK Gunung Mulya dan Kanisius

\*\*\*\*\*

**PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA  
APARATUR PEMERINTAH DALAM  
RANGKA PELAYANAN KEPENTINGAN UMUM**

Oleh :  
**Adjat Daradjat**

**I. PENDAHULUAN**

Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu dalam kedudukannya sebagai warga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan masing-masing menginginkan agar kepentingannya tersebut dapat terpenuhi. Namun untuk terpenuhinya sesuatu kepentingan yang cenderung meningkat, tidak jarang harus mengorbankan pihak lain yang juga memiliki intensitas dan dinamika yang terus berkembang. Fenomena tersebut tidak jarang menimbulkan gejolak yang mengarah pada terjadinya konflik kepentingan.

Untuk menjaga keutuhan sistem dan lebih memungkinkan tercapainya kepentingan-kepentingan, dibentuklah pranata negara yang berfungsi untuk mengatur, menyesuaikan atau menentukan prioritas bagi terpenuhinya kepentingan serta tujuan berbagai pihak.

Di dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, otoritas negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah (*authority is derived from the concern of the governed*) Oleh karena itu administrasi negara melalui aparturnya berkewajiban melayani masyarakat sedemikian rupa, dengan tiga implikasi bagi kinerjanya yaitu : a) setiap warga negara harus dilayani dan tidak memihak, b) semua itu dicapai berlandaskan pada keputusan dan keinginan politik dari lembaga-lembaga perwakilan dan c) bahwa layanan kepentingan tersebut harus bersifat konsisten. ( Kumorotomo. 1999, 306).



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bennis, W dan Mische, 1995, *Organisasi Abad 21, Re Inventing melalui Re Engineering*, Alih bahasa Richmayati dan Siboro, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Bill, Creech, 1996, *Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu*, Alih bahasa Sindoro, A. Dan L. Saputra, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Davis & New Strom, 1996, *Perilaku dalam Organisasi*, Alih bahasa Agus Dharma, Gelora Aksara Tama/Erlangga, Jakarta.
- Frederickson, H. George, 1994, *Administrasi Negara Baru*, alih bahasa. Al-Ghozei Usman, LP.3 ES, Jakarta.
- Holcombe, Arthur.N, 1950, *Our More Perfect Union*, Harvard University.
- Kumorotomo, Wahyudi, 1999, *Etika Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada. PT, Jakarta.
- LAN-RI, 2000, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta.
- Senge, Peter M, 1996, *Disiplin ke Lima*, alih bahasa Nunuk, Bina Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang.P, 1998, *Manajemen Strategik*, Bumi Aksara Jakarta.
- Simon, Herbert, 1998, *Administrative Behaviour*, alih bahasa St-Diajung, Bumi Aksara, Jakarta.
- Stoner, James, A.F, *Manajemen*, alih bahasa Alfonsus Sirait, Erlangga, Jakarta.
- Thoha, Miftah, 1998, *Perilaku Organisasi*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.
- Winardi, 1997, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung.
- Whittaker, J.B, 1993, *The Government Performance Result Act*,

\*\*\*\*\*



## IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MODEL DESENTRALISASI DI INDONESIA

Oleh :  
**Arnia Fajarwati**

### ABSTRAK

Desentralisasi sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelbagai konstitusi dan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, cita desentralisasi senantiasa menjadi roh-nya pelaksanaan pemerintahan daerah.

Persoalannya adalah masalah implementasi desentralisasi di Indonesia amat beragam, dan seolah-olah tidak konsisten satu sama lain dalam produk undang-undangnya sehingga berpengaruh pada kemamfaatan asas desentralisasi itu sendiri. Padahal dengan desentralisasi akan memberikan peluang otonomi daerah dan akan memandirikan daerah dalam mengatur dirinya sendiri.

**Kata Kunci : Desentralisasi, Implementasi Desentralisasi dan Implikasi Desentralisasi.**

### I. Pendahuluan

Gelombang perubahan yang melanda Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru, membuka wacana dan gerakan baru di seluruh aspek kehidupan masyarakat tak terkecuali dalam dunia pemerintahan. Semangat yang menyala-nyala untuk melakukan reformasi, memberikan energi yang luar biasa bagi bangkitnya kembali wacana otonomi daerah, setelah hampir sepertiga abad ditenggelamkan oleh rezim otoritarian Orba dengan politik *stick and carrot*nya. Sekalipun demikian, di tahun lima puluhan aspirasi otonomi daerah ini dipercaya sebagai sebab utama lahirnya serangkaian pemberontakan perspektif teoritis desentralisasi dan otonomi daerah terhadap “Jakarta” sebagai wujud kekecewaan daerah atas pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistis.

Model pemerintahan sentralistis bukan saja dipandang tidak efektif bagi upaya-upaya yang memajukan dan mensejahterakan masyarakat daerah, tapi lebih jauh telah mengakibatkan kemunduran dan keterbelakangan



relatif masyarakat daerah dan lebih parah lagi telah menghancurkan diri, kemandirian, infrastruktur kepemimpinan lokal dan sebagainya, yang semuanya itu secara stimultan berimplikasi pada stagnasi perkembangan masyarakat daerah di hampir seluruh aspek, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam tulisan ini akan mencoba menguraikan bagaimana model desentralisasi yang telah diterapkan di Indonesia dan implikasi apa yang muncul dari kebijakan tersebut serta kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dengan mengkaji berbagai teori yang berhubungan dengan tulisan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cheema, G.S, & Rondinelli, D.A., ( eds ) 1983 *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, Sage Publication, Baverly Hills.
- Gaffar, A, 2000, *Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*, Insist Press, Yogyakarta
- Mawhop, Philip, (ed) 1983, *Local Goverment in the Third World the Experience of Tropical Aprica*. New York: John Wiley & Sons.
- Santoso, S.B., 2000, *Prospek dan Tantangan Otonomiu Daerah di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999:Implikasi, Kendala dan Agenda Kebijakan( Kalam Widyapraja Vol 36*, Jakarta.
- Smith, B.C. 1985 *Decentralization, The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwim, London
- Suryaningrat, B, TT, 2000,*Pemerintahan dan Administrasi Desa*, PT Mekar Djaja, Bandung Sinar Grafika,
- Sunarno, Siswanto. 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah 2004 dan Juklak, Sinar Grafika, Jakarta.

\*\*\*\*\*



**MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN  
PUBLIK MELALUI PROCESS BUSINESS REDESIGN (BPR)**

Oleh:  
**Nia Pusparini**

**ABSTRAK**

Pada eraglobalisasi telah mendorong dan membuka peluang kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal. Pelayanan pada umumnya diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari suatu organisasi, baik privat maupun publik. Dalam sistem ini penting bagi organisasi tersebut untuk meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders* yang sangat berperan dalam mempengaruhi kelanjutan keberadaan daripada organisasi tersebut. Bahkan suatu organisasi terutama privat dapat tergusur dari kompetisi jika tidak secara fundamental memastikan bahkan mereka benar-benar melayani pelanggannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Organisasi-organisasi tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan yang mendorong berkembangnya budaya paternalistik turut memperkeruh sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan seringkali mereka memperoleh perlakuan istimewa. Hal ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Struktur birokrasi juga merupakan penghalang terbesar untuk melakukan perubahan pemerintahan. Perubahan struktur hanya bermanfaat jika sejalan dengan strategi untuk perubahan.

Bila suatu organisasi publik hanya memfokuskan diri terhadap perbedaan budaya dan metode antara organisasi pemerintah dan privat, hal ini hanya akan memperlebar kesenjangan retorik antar kedua sektor tersebut. Dengan demikian harus dibina hubungan yang kondusif antara masyarakat dan organisasi publik dengan membuang birokrasi yang kaku. Pemerintah perlu menunjukkan responsivitas pada masyarakat dalam menemukan satu solusi terhadap sistem birokrasi dengan menetapkan misi, visi dan tujuan



(secara nasional) yang jelas serta memberi penjelasan dan pengarahan pada masyarakat.

Dalam proses bisnis cara baru (*Business Process Redesign*) para birokrat perlu melakukan transformasi terhadap perubahan agar lebih mendasar. Mereka diminta untuk mengabaikan prosedur dan struktur yang ada dan menggantikannya dengan cara baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, melalui pasar atau konsumen adalah kekuatan yang mendorong proses-proses inti. Dalam hal ini pasar dan pelanggan, maka perspektif ini memaksa bisnis untuk melihat aktivitas kegiatannya dari segi pandangan eksternal. Dengan melihat keadaan kegiatan organisasi dari pandangan eksternal organisasi privat maupun publik dapat mengatasi pemikiran yang tradisional yang selama ini mengukungnya.

**Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Business Process Redesign (BPR)**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Carr, David, and Johansson, Henry J. 1995. *Best Practices In Reengineering*. New York: Mc Graw-Hill, Inc.
- Champy, James. 1996. *Manajemen Rekayasa Ulang*. Alih Bahasa Ir. Agus Maulana M.Sm.. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- De Vrye , Catherine. 1997. *Good Service is Good Business 7 Strategi Sederhana Menuju Sukses*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus Dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Heller, Robert. 2002. *Essential Managers "Managing Change"*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Linden, Russel M.1994. *Seamless Government "A Practical Guide to Reengineering in the Public Sector"*. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.
- Mourier, Pierre and Smith, Martin, Ph.D. 2001. *Conquering Organizational Change "How to Succeed Where The Most Companies Fail"*. Atlanta, Georgia: CEP Press,.



Namgay, Phuntsho. *Quality Service and the Public Sector* (WWW document). URI.<http://www.rim.edu.bt>.

Raminto, dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wheeler, Pendlebury, Mchugh, Johansson. 1995. Alih bahasa: Agus Maulana. *Rekayasa Ulang Proses Bisnis*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

\*\*\*\*\*

## **MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA**

Oleh :  
**Tatang Sugandi**

### **1. Pendahuluan**

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD (Human Resource Department). Menurut *J.A.F. Stoner* manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Edwin B. Flipppo, *Personel Management*, 6th Edition, Mc. Graw-Hill, Inc. 1984

Hamellink, C. *Cultural Synchronization*, New York, Free Press. 1980





James AF. Stoner, *Management, 3th Edition*, Prentice Hall International, Inc.  
1986

ME. Porter, 2<sup>nd</sup> Edition, *Competitive Strategy*, New York, Free Press. 1980

Santoso Budi Toto, 2000, *The Esserce Of Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi And Person Education Asia Pie. Ltd : Yogyakarta

\*\*\*\*\*

## **PERAN STRATEGIS HUMAS PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT**

Oleh:  
**Indriani**

### **ABSTRAK**

Pemberdayaan lembaga humas pemerintah perlu dilakukan dalam pengelolaan informasi kebijakan pemerintah, sehingga berbagai informasi dapat disampaikan pada masyarakat. Citra humas pemerintah perlu diperbaiki dengan peningkatan kemampuan skill di bidang kehumasan. Sementara dalam bidang SDM, perlu adanya sistem rekrutmen yang didasarkan pada kriteria kebutuhan bidang kehumasan.

Setelah itu, perlu diselenggarakan sejumlah pelatihan ketrampilan bidang kehumasan yang mampu menunjang skill dan meningkatkan kapasitas petugas dan pejabat humas pemerintah. Humas pemerintah harus mampu melakukan aktivitas komunikasi yang tepat, cepat dan akurat, dalam rangka penyebaran informasi yang utuh, benar dan bermanfaat.

Juga mengembangkan jaringan kerja kehumasan antar instansi pemerintah pusat dan antar instansi pemerintah daerah serta memastikan komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang proaktif perlu dilakukan untuk, membangun citra dan reputasi aparatur pemerintah yang baik dan membentuk opini publik menjadi positif.



**Kata Kunci : Pemberdayaan Humas, jaringan kerja dan Pelayanan Prima**

**A.Pendahuluan**

Saat ini, belum ada pemahaman yang memadai mengenai komunikasi organisasi dan pengelolaan kehumasan pemerintah yang optimal dan profesional. Sebagian besar humas pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih banyak terkendala adanya tata kerja, infrastruktur kehumasan, organisasi humas, kultur/budaya kerja atau pejabat, sarana dan prasarana yang memadai. Akibat dari kendala tersebut membuat lemahnya pengelolaan “early warning system” terhadap isu dan krisis, saluran komunikasi belum terbuka, dan belum ada mekanisme untuk mengukur efektivitas saluran komunikasi yang ada.

Keadaan humas dan kendala-kendala yang dihadapi oleh humas pemerintah saat ini diantaranya adalah: eselonisasi pejabat humas, kompetensi SDM humas, birokrasi, nomenklatur yang berbeda di setiap instansi dan tolak ukur keberhasilan humas. Humas dalam upaya membangun citra pemerintah di mata masyarakat maupun dunia, yang semestinya merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pemerintahan yang dapat menjembatani arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya pada era saat ini. Selain itu, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) mengamanatkan agar aparaturnegara mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, produktif, transparan dan bebas KKN. Perwujudan nyatanya antara lain tercermin dari penyelenggaraan pelayanan publik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrachman, Oemi. 2001. *Dasar-dasar Public Relations*. Bandung : Penerbitan PT. Citra Aditya Bakti

Kusunastuti,Frida. 2001. *Dasar-Dasar Humas* . Jakarta : Ghalia Indonesia  
[http:// peran.kerja.humas.com/](http://peran.kerja.humas.com/)



[http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/23/Ruang\\_Publik\\_Politis\\_Komunikasi\\_Politis\\_dalam\\_Masyarakat\\_Majemuk](http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/23/Ruang_Publik_Politis_Komunikasi_Politis_dalam_Masyarakat_Majemuk)  
[www. Public relations.com](http://www.Publicrelations.com)

\*\*\*\*\*

**SINETRON INDONESIA, DIBALIK LAYAR KACA**  
**(Remaja Dalam Cengkeraman Kapitalisme Mutakhir)**

Oleh :  
**Hana Silvana**

**ABSTRAK**

Masa remaja merupakan masa krisis dalam hidup manusia karena di masa ini seseorang mencari jati diri dan mempersiapkan kehidupan di masa berikutnya. Dalam dunia yang semakin berkembang muncul issue besar tentang aging; dalam setiap rentang umur, karakteristik gaya hidup atau budaya dapat dipandang berbeda antar generasi. Remaja merupakan suatu paradoks, ia adalah subyek aktif dalam membentuk budayanya sendiri (youth culture) namun juga merupakan obyek dari “tangan-tangan yang tak terlihat” dan begitu berkuasa untuk menentukan nasib remaja.

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis suatu fragmen artis-artis remaja sebagai obyek yang dikendalikan oleh kekuatan besar di belakang media. Kekuatan ini didorong oleh motif ekonomi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Imran, Ahda . 2007. **Sinetron , Menu anak Selera Dewasa**, Artikel Pikiran Rakyat, 23 Juli.

Juli Rachmiatie, Ati, 2006. Makalah **Khasanah Lokalitas dalam Tayangan TV sebagai Media Pendidikan dan Hiburan.**

Seminar Pemantauan Isi Siaran TV, 27 Februari.



Nielsen AGB Research, 2007. **Sinetron Indonesia dan Pembodohan**,  
Talkshow Media Literasi, IMIKI Jabar, 6 Maret.  
Silet RCTI, 2007 , **Sinetron remaja kita**, 21 Juli.

\*\*\*\*\*

## **MOTIVASI SEBAGAI FAKTOR YANG MENGERAKKAN DAN MENGARAHKAN PERILAKU**

Oleh:  
**Susi Erwina**

### **ABSTRAK**

Motivasi mengacu pada factor yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Istilah motivasi mengacu pada sebab atau mengapa dari perilaku. Selain menguatkan organisme , motivasi cenderung mengarahkan perilaku. Upaya untuk menjelaskan tindakan yang dimotivasi mempunyai berbagai keistimewaan diantaranya terdapat dalam *Teori Naluri dan Teori Pengurangan Dorongan*.

Teori Naluri mempostulasikan kecenderungan bawaan terhadap tindakan tertentu. Sedangkan Teori Pengurangan Dorongan mendasari motivasi tentang kebutuhan jasmaniah yang menimbulkan ketegangan atau dorongan. Kemudian manusia berusaha mengurangi dorongan dengan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan. Kebutuhan biologis menimbulkan tindakan karena tubuh cenderung untuk mempertahankan lingkungan internal (Homeostatis).

Homeostatis merupakan kecenderungan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang konstan ( Misalnya : Orang sehat mempertahankan suhu badannya dalam suhu beberapa derajat, adanya konsentrasi gula darah dalam tubuh dan sebagainya ) .



### DAFTAR PUSTAKA

- Burgess, R.L, & Huston T.I. ( Eds. ) 1979. *Social Exchange in Developing Relationships*. New York; Academic Press.
- Duck S. & Gilmour R. ( Eds. ) 1981. *Personal Relationships*.New York. Academic Press.
- Hendrick, C. & Hendrick, S. 1983. *Liking, Loving, and Relating*. Monterey, CA : Brooks/Cole.
- Kelley H.H, and friends 1983.*Close Relationships*.New York : WH.Freeman
- Rubin Z.1980. *Children's friendships*.Cambridge, MA.Harvard University Press.
- Walster E, & Walster, GW. 1978. *A New Look at Love*.Reading.MA.: Addison Wesley.
- Rita L.Atkinson & Richard C. Atkinson. 1983. *Introduction to Psychology*, Eight Edition. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Sommer, R. 1969.*Personal Space : The Behavioral Basis for Design*.Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

\*\*\*\*\*

### REFORMASI BIROKRASI MENUJU GOOD GOVERNANCE

Oleh :  
**Achdijat Sulaeman**

### ABSTRAKSI

Ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dielakkan lagi. Namun demikian, penerapan tata pemerintahan yang baik tidak semata-mata karena adanya proses globalisasi tersebut. Ada tidak adanya globalisasi, tata pemerintahan yang baik tetap diperlukan, bahkan sejak suatu organisasi pemerintahan atau negara dibentuk. Tata pemerintahan yang baik meliputi tata pemerintahan yang baik untuk



sektor publik ( good public governance ) dan tata kelola/keperintahan yang baik untuk dunia usaha swasta ( good corporate governance ). Tulisan ini hanya difokuskan kepada tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik saja.

Membangun *Good Government and Good Governance*, merupakan topik yang selalu aktual dan menarik dibicarakan, sebab membangun masa depan Indonesia sebagai wujud daripada pengamalan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, tidak akan pernah terwujud, jika bangsa Indonesia gagal membangun pemerintah dan tata pemerintahan yang baik (*Good Government and Good Governance*).

Dalam era globalisasi yang terutama dicirikan dengan ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik ( good governance ) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dielakkan lagi. Namun demikian, penerapan tata pemerintahan yang baik tidak semata-mata karena adanya proses globalisasi tersebut. Ada tidak adanya globalisasi, tata pemerintahan yang baik tetap diperlukan, bahkan sejak suatu organisasi pemerintahan atau negara dibentuk. Tata pemerintahan yang baik meliputi tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik ( good public governance ) dan tata kelola/keperintahan yang baik untuk dunia usaha swasta ( good corporate governance ).

Oleh karena itu, membangun pemerintah dan tata pemerintahan yang baik, merupakan keniscayaan yang bersifat *condition sine quanon* bagi bangsa Indonesia. Untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil Presiden merupakan *entry point*, karena seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat akan memilih para wakil rakyat di semua tingkatan (DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan DPR RI untuk parlemen nasional), dan memilih pemimpin pemerintahan Indonesia dalam pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009, yang akan memimpin bangsa dan negara Indonesia dalam kurun 5 tahun ke depan (2009-2014).



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **UNDANG-UNDANG**

1. UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan;
2. UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
9. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
10. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PRATUN);
13. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
14. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

### **PERATURAN PEMERINTAH**

1. PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
2. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
3. PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;



4. PP No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat  
Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
8. PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
9. PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah;
13. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

#### **PERATURAN PRESIDEN**

1. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun (RPJM) 2004-2009;
3. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
6. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam





Penyediaan Infrastruktur;

7. Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.

### **KEPPRES**

1. Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
2. Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keppres No. 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
4. Keppres No. 80 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

### **INPRES**

1. Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
2. Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

\*\*\*\*\*

## **PENTINGNYA HUMAN RELATIONS DALAM ORGANISASI**

Oleh:

**Deden Suhendar**

### ***Pengertian Human Relations***

Sebagai makhluk sosial, manusia menyadari bahwa ia tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, ia membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan dengan mengadakan interaksi sosial, pengetahuan dan pengalamannya bertambah. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan sesama manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, secara harmonis dan efektif sangat diperlukan, lebih-lebih sebagai seorang administrator atau manajer yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, harus



mampu bergaul dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam membina bawahannya.

Di negara-negara yang sudah maju, hubungan antar manusia atau *human relations* semakin mendapatkan perhatian para pemimpin dalam jenis dan jenjang organisasi apapun. Oleh karenanya, hubungan antar manusia semakin dirasakan penting kehadirannya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia.

Bentuk-bentuk psikologis dan konflik-konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi sering terjadi, bukan saja antara manajer dengan karyawan, benar-benar dapat mengganggu jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.

Hubungan antar manusia juga dirasakan penting oleh manajer untuk menghilangkan 'luka-luka' akibat salah komunikasi dan salah interpretasi yang terjadi antara manajer dengan bawahannya atau dengan publik di luar organisasi.

Sejauh ini seringkali disebut kata "hubungan antar manusia" merupakan terjemahan dari kata *human relations*. Namun, sesungguhnya apakah yang dimaksud dengan hubungan antar manusia? Istilah hubungan antar manusia telah digunakan secara luas, baik dalam arti (yang paling) luas hingga (paling) sempit. Dalam arti luas, hubungan antar manusia merupakan interaksi antara orang-orang dalam semua jenis kegiatan, misalnya dalam bisnis, pemerintahan, perkumpulan-perkumpulan sosial, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, di bioskop, dan di jalan.

Pengertian hubungan antar manusia dalam tulisan ini, dilihat dalam arti yang lebih sempit, khususnya dalam organisasi kerja formal, dimana terdapat struktur hierarkhis yang bersifat formal antara atasan dan bawahan, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, tujuan bersama yang hendak dicapai, dan lain-lain. Dengan demikian, interaksi manusia yang dijalankan di bioskop, di rumah, dan lain-lain, tidak termasuk dalam pengertian hubungan antar manusia dalam modul ini. Banyak pengertian hubungan antar manusia yang telah dikemukakan dalam keputusan yang ada sesuai dengan visi dan nuansa penulisannya masing-masing. Misalnya, Jack Halloran dalam bukunya yang berjudul: "*Aplied Human Relation and Organizational Approach*", menyatakan bahwa hubungan antar manusia adalah "*a study of how people work together to satisfy personal needs and organizational goals*".



Lebih jauh lagi, Fred J. Carvell merumuskan arti hubungan antar manusia sebagai berikut: "*Human relations is the integration of people into a work situatio that motivates them to work together productively, and with economic, psychological, and social satisfaction*". Artinya: *Hubungan antar manusia adalah perpaduan dari pada orang-orang ke dalam suatu situasi kerja yang mendorong mereka untuk bekerja sama secara produktif, sehingga tercapai kepuasan, baik dilihat dari segi ekonomi, kejiwaan, maupun sosial.*

Permasalahan hubungan antar manusia adalah permasalahan ruhaniah, yaitu proses ruhaniah yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, sikap, dan tingkah laku menuju tercapainya suatu kebahagiaan atau kepuasan batin. Proses ini berlangsung pada dua atau lebih orang yang terlibat dalam hubungan komunikatif, yakni komunikasi antar individu yang karena sifatnya dialogis, maka masing-masing tahu, sadar, dan merasakan akibatnya. Jika semua merasa bahagia, maka orang yang melakukan kegiatan hubungan antar manusia itu dapat dikatakan berhasil. Namun, apabila tidak menimbulkan rasa puas, berarti hubungan antar manusia yang dilakukan dapat dikatakan gagal. Kepuasan, yang dalam aktifitas hubungan antar manusia merupakan faktor yang penting, pada hakikatnya merupakan terpenuhinya kebutuhan seseorang sampai tingkat tertentu. Kebutuhan seseorang, dalam perjalanan hidupnya tidak akan terpuaskan atau terpenuhi secara mutlak (100 %), dan apabila seluruh kebutuhan terpenuhi secara mutlak, maka orang tersebut pada hakikatnya telah meninggal. nsadi, kepuasan orang bersifat relatif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin Abdulrachman, 1979, *Human Relations untuk Manajemen (teori dan praktek)*, LAN RI: Bandung
- Astrid S. Susanto, 1974, *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, Binacipta: Bandung
- Dubin, 1977, *Human Relations in Administration*, Prentice Hall of India: New Delhi
- Fautino Cardoso Gomes, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset: Yogyakarta
- Miftah Thoha, 1983, *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta



- Oemi Abdurachman, 1982, *Human Relations & Public Relations*, Alumni: Bandung
- , 1988, *Hubungan Insani*, Remaja Karya: Bandung
- Siagian, Sp., 1982, *Filsafat Administrasi*, Bina Cipta: Jakarta
- Soebagio Sastrodiningrat, 1979, *Perilaku Administrasi*, Karuniaka UT: Jakarta
- Soewarno Handayaniingrat, 1979, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Suriakusumah, 1979, *Peranan Human Relations dan Public Relations dalam Organisasi Kerja*, LAN RI: Bandung

\*\*\*

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRINSIP MENGENAL  
NASABAH TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG**

(Studi Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003  
di PT Bank Central Asia, Tbk. Bandung)

Oleh :

**Nunung Hastika**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penelitian**

Masalah pencucian uang makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan dari waktu ke waktu, sementara banyak negara yang belum menetapkan sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan kejahatan yang harus diberantas. Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara. Jaringan kejahatan pencucian uang menjadi universal dan dapat menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.

Pengertian pencucian uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 adalah perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,



menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke luar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dengan proses pencucian uang ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*), dalam proses pencucian uang, uang tersebut disalurkan melalui “jalan penyelatan” (*imaze way*). Usaha pencegahan kegiatan pencucian uang ini penting karena diperkirakan 10% dari seluruh uang yang beredar didunia adalah berasal dari *White Collar Crime*, suatu jumlah yang cukup fantastis karena uang-uang tersebut dari perbuatan jahat yang berlatar belakang immoralitas.

Proses pencucian uang melalui tiga tahap yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari satu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan, contoh : menempatkan dana (illegal) pada bank, menyelundupkan uang dari satu negara ke negara lain, memecah setoran tunai ke dalam jumlah di bawah *threshold bank (structuring)*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bacal, Robert. 2002. Performance Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institution. The Conseptual Foundation of Public Policy*. Oxford: Basit Black Well.
- Dunn, William N. 1981. *Public Policy Analysis. An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- . 2000. Analisa Kebijakan Publik. Alih Bahasa: Darwin Muhajir. Edisi ke II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.



- Effendy, Onong. U. 1984. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuady, Munir. 2004. Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gibson, James, L. et all. 1990. Organisasi. Jilid I. Perilaku, Struktur, Proses, terjemahan Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, M. Irfan. 1993. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Karunika III.
- Jenkin, W.I. Martin Robertson. 1978. *Policy Analysis*. Oxford: Boston Press.
- Koentjaraningrat, 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Edisi ke Tiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. Etika Administrasi Niaga. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Mukaram, Marwansya. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga.
- Nazir, Moh. 1993. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. Hadari. 1998. Pengawasan Melekat di Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga.
- Ndara, Talizihu, 1997, Pengantar Teori Pengembangan SDM, Rineka Cipta, Jakarta
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime* (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus. 2003. Hukum Internet di Indonesia Yogyakarta: UII Press.
- Kaplan, Robert M. and Dennis P. Saccuzza. 1993. “*Psychological Testing (Principles, Applications and Issues)*” 3<sup>rd</sup> edition. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Robbin, Stephen P. 1979. *Organizational Behaviour: Concept, Controversies, and Application*, International Editions. New York: Prentice Hall.
- Rusidi. 1991. Filsafat Ilmu dan Berpikir Ilmiah. Bandung: Fakultas Pertanian Unpad.
- Sedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Bandung: Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.



- Siagian, Sondang P. 2000. Teori Perkembangan Organisasi Jakarta: Bumi Aksara.
- Steer, Richard M. 1980. Efektivitas Organisasi (Terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Sudjana. 1996. Metode Statistik. Bandung: Torsito.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2004. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tampubolon, Robert. 2004. Manajemen Risiko. Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Thoha Miftah. 1990. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Thornhill, William T. 1989. *Effective Risk Management for Financial Organizations, Bank Administration*. Illinois: Institute Rolling Meadows.
- Umar, Husein. 2001. Manajemen Risiko Bisnis – Pendekatan Finansial dan Non Finansial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dokumen:
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Fokusmedia

\*\*\*\*\*

## **REVOLUSI INTEGRATIF : SENTIMEN SENTIMEN PRIMORDIAL DAN POLITIK SIPIL DI NEGARA NEGARA BARU**

Oleh :

**Dudung Abdurroup**

### **1. Pendahuluan**

Ketegangan yang muncul di negara-negara baru antara memelihara identitas diri atau golongan yang diakui masyarakat dengan keinginan membangun sebuah komunitas nasional yang kuat merupakan suatu gejala



yang terjadi dimana-mana. Di negara-negara baru yang berusaha untuk memapankan sebuah pola politik terjadi pertentangan antara loyalitas-loyalitas primordial dengan tatanan sipil.

Regionalisme pusat – pinggiran dan kepemimpinan ganda di Indonesia, persatuan antar ras dalam satu partai di Malaysia, asimilisionisme agresif yang terbungkus dalam legalisme konstitusional di Burma, sebuah partai pusat yang bersifat kosmopolitan dengan mesin-mesin propinsi yang berhadapan dengan banyak front melawan setiap macam parokialisme di India, penyusunan daftar sektarian dalam pemerintahan di Lebanon, pemerintahan otokratis berwajah ganda di Maroko, dan latihan sepak bola uji keseimbangan di Nigeria. Adalah beberapa kasus terjadinya usaha-usaha menyelesaikan masalah yang disebabkan adanya sentimen-sentimen primordial berhadapan dengan politik sipil di negara-negara baru, atau dalam istilah Clifford Geertz disebut dengan "Revolusi Integratif".

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman wahid, 1999, *Membangun Demokrasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Althoff, Phillip & Michael Rush, 1997, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Amien Rais, 1998, *Politik Adiluhung: Menumbuhkan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, bandung: Zaman wacana Mulia.
- Aderson Benedict, 1999, *Komunitas-komunitas Imajiner : Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Bertram, Christoph, 1988, *Konflik dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Terjemahan A. Hasymi ali, Jakarta : Bina Aksara.
- Blondel, J., 1995, *Comparative Government : an Introduction (Second Ed.)* Prentice Hall, University Cambridge Press.
- Breuilly, John, 1985, *Nationalism and The State*, Chicago : University of Chicago Press.
- Dahl, Robert A., 1991, *Modern Political Analysis (Fifth Ed.)*, Prentice Hall International Editions, Yale University
- Duverger, Maurice, 1993, *Sosiologi Politik*, Jakarta: rajawali Press





- Evers, Hans-Dieter, (Edit), 1988, Teori Masyarakat : Proses Peradaban dalam sistem Dunia Modern, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Geertz, Clifford, 1974, The Interpretation of Cultures : Selected Essay, London: Hutchinson & CD Publisher, Ltd
- Iver, Mac, 1984, Negara Modern, Terjemahan Moertono, Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad A.S. hikam, 1996, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3Es
- Sanderson, Stephen, K., 1973, Sosiologi Makro, Jakarta: Rajawali Press
- Smith, Anthony, D., 1973, the Consept of Social Change, London: Routledge and Kegan Paul.
- , 1981, The Ethnic Revival, Cambridge: Cambridge University Press.

\*\*\*\*\*